

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, segala urusan yang menyangkut kewenangan daerah telah beralih menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus berbagai aspek pemerintahan daerahnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi kualitas pelayanan publik, melibatkan peran masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Secara garis besar, tujuan utama dari percepatan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, serta karakteristik yang ada di daerah tersebut.¹

Penerapan sistem desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki dengan sebaik mungkin, salah satunya dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki kedudukan strategis sekaligus memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Dalam artian yang lebih luas, pariwisata kerap dipandang sebagai kegiatan yang bersifat multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan yang menyangkut aspek

¹ Feby Hidayat, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti, "Satu Nagari Satu *Event*" Sebuah Upaya Untuk Kemajuan Kabupaten Tanah Datar," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9.2 (2023), hal. 115–124.

sosial budaya, ekonomi, dan politik.² Di samping itu, secara potensial, sektor pariwisata memiliki peluang yang besar untuk dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah.

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan promosi serta daya tarik suatu destinasi wisata, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari arah pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia. Pembangunan dan pengembangan pariwisata ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam aspek pengaturan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peruntukkan berbagai infrastruktur yang mendukung kebutuhan sektor pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata yang dirancang dan dikelola secara berkelanjutan dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat diyakini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan pariwisata juga berpotensi menciptakan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

² Vivi Hendrita, "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanah Datar," *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 2.2 (2017), hal. 73.

upaya pelestarian budaya dan lingkungan, yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah setempat.³

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan program pengembangan serta pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kehadiran wisatawan di suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk setempat.⁴

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kekayaan alam yang luas dan beragam, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya daya tarik kunjungan wisatawan. Selain potensi wisata alam, keberadaan wisata budaya dan sejarah juga menjadi kunci dalam sektor pariwisata di daerah ini, misalnya Istano Basa Pagaruyung yang merupakan Rumah Adat Suku Minangkabau, kemudian Nagari Tuo Pariangan yang terkenal akan keindahan alam, adat istiadat dan budaya yang masih kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.⁵

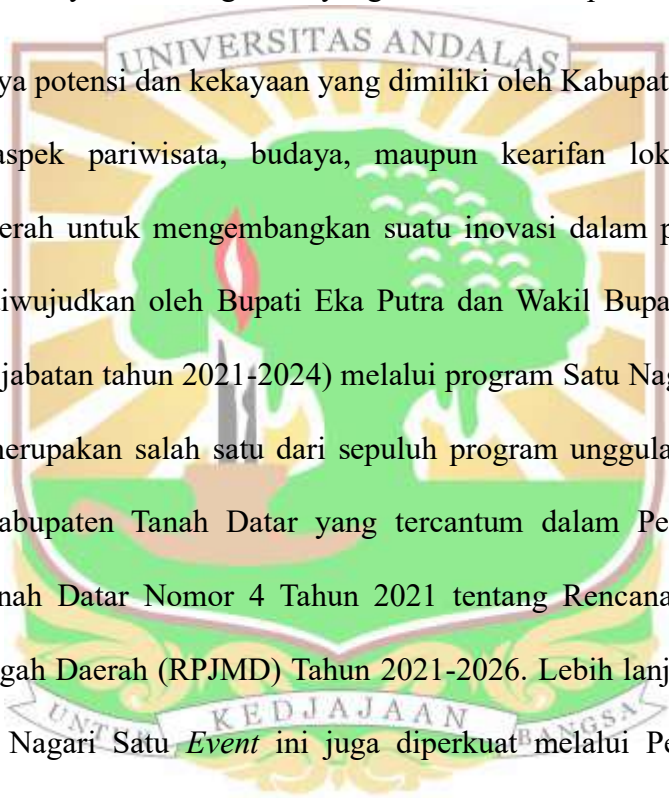
Kabupaten Tanah Datar juga dikenal akan makanan khas daerah yang lezat seperti “Randang Baluik”, “Lamang Tapai”, “Pangek Lapuak”, dan masih banyak

³ Putu Wira Parama Suta dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5.1 (2018), hal. 144.

⁴ Nurhadi et.al, “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokero),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2.2 (2020), hal. 325–331.

⁵ Hidayat, *Op.Cit.* hlm 116.

lainnya. Lalu keindahan alam lainnya yang mempesona seperti “Puncak Aua Sarumpun”, “Panorama Tabek Patah”, “Puncak Pato”, dan lain-lain. Selanjutnya, Kabupaten Tanah Datar juga memiliki warisan budaya tak benda yaitu “Rumah Gadang”, “Talempong Pacik”, “Pacu Jawi”, “Bansi”, “Kawa Daun”, “Tenun Pandai Sikek”, dan masih banyak situs-situs budaya serta adat istiadat yang melekat dengan nilai kebudayaan Minangkabau yang berada di Kabupaten Tanah Datar.⁶



Besarnya potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar, baik dalam aspek pariwisata, budaya, maupun kearifan lokal, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu inovasi dalam pengelolaannya. Hal tersebut diwujudkan oleh Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian (periode masa jabatan tahun 2021-2024) melalui program Satu Nagari Satu *Event*. Program ini merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan (Progul) dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan Satu Nagari Satu *Event* ini juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.⁷

Di samping itu, pelaksanaan program ini juga merupakan salah satu bentuk visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata yang kemudian tertuang di dalam RIPPARKAB

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

(Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten). Dalam RIPPARKAB ini memuat prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah.⁸ Sehingga rencana induk ini yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya, serta tradisi kearifan lokal setempat melalui kesenian, kerajinan anak nagari, kuliner tradisional, bazar UMKM, dan potensi alam yang dimiliki. Adanya program ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan mengenal secara langsung keunikan serta kekhasan suatu nagari. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, program ini ditujukan untuk memberikan ruang bagi pelaku industri kreatif untuk berbagi pengetahuan dan memperkenalkan produk unggulan.

Pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tetapi juga melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan. *Stakeholder* tersebut meliputi pemerintah daerah, pemerintah nagari sebagai pelaksana di tingkat lokal, niniak mamak sebagai tokoh adat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 2 Tahun 2023, “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2025,” 2025.

UMKM, pihak swasta serta masyarakat. Keterlibatan berbagai *stakeholder* tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* merupakan bentuk kolaborasi berbagai aktor dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis nagari.

Dalam pelaksanaan program, setiap *stakeholder* memiliki fungsi, kewenangan sumber daya, serta kepentingan yang berbeda-beda. Pemerintah daerah berperan sebagai perumus kebijakan dan fasilitator program, pemerintah nagari sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan *stakeholder* lainnya memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perbedaan peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dirancang, tetapi juga dipengaruhi kemampuan *stakeholder* dalam menjalankan peran, membangun koordinasi serta menjalin kolaborasi selama pelaksanaan kegiatan.

Meskipun seluruh *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung keberhasilan Program Satu Nagari Satu *Event*, setiap *stakeholder* memiliki tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang berbeda dalam pelaksanaan program tersebut. Perbedaan ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, koordinasi antar pihak, serta pelaksanaan kegiatan di setiap nagari. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan *stakeholder* untuk mengetahui posisi, peran, serta hubungan masing-masing pihak yang terlibat. Melalui pemetaan tersebut dapat diidentifikasi *stakeholder* yang memiliki pengaruh besar, *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi, serta pihak-pihak yang berperan sebagai pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan Program Satu Nagari Satu *Event*.

Dari penelusuran peneliti, setidaknya terdapat lima penelitian sebelumnya terkait dengan pemetaan pemangku kepentingan, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratih, Retno, dan Amni (2023)⁹, Debby & Janianton (2021)¹⁰, Tiberias & Desiderius (2023)¹¹, Denny & Dewi (2023)¹², dan Siti, Indra, Hari Kaskoyo, dkk (2022)¹³. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini dari segi penggunaan teori, fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini akan berfokus pada pemetaan pemangku kepentingan dalam konteks lokal yaitu di nagari (desa) dengan program budaya spesifik yang menggabungkan elemen budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta mengeksplorasi dinamika hubungan antara pemangku kepentingan, termasuk potensi kolaborasi.

1.2 Rumusan Masalah

Secara historis, Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi pariwisata yang sangat strategis, karena dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan masyarakat Minangkabau dengan peninggalan sejarah kerajaan Minangkabau yang bernilai

⁹ Astuti dkk., “Stakeholders Mapping Pengelolaan Wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo,” *Journal of Public Policy and Management Review*, 01 (2023), hal. 1–17.

¹⁰ Debby Fifiyanti dan Janianton Damanik, “Pemetaan Peran Dan Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10.3 (2021), hal. 448.

¹¹ Tiberias Joy Lampung dan Desiderius Priyo Sudibyo, “Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Masa Peralihan Pandemi Covid-19,” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3.2 (2023), hal. 357–369.

¹² Denny Iswanto dan Dewi Bayu Pamungkas, “Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis,” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6.1 (2023), hal. 15–28.

¹³ Siti Fauzia Rochmah et al., “Pemetaan Stakeholder Dalam Pengelolaan Kawasan Pantai Pangumbahan , Kabupaten Sukabumi *Stakeholder mapping in Management of Coastal Turtle Park Conservation Area , Pangumbahan Beach , Sukabumi Regency*,” *Journal of Tropical Marine Science*, 5.2 (2022), hal. 155–165.

tinggi. Selain itu, daerah ini juga memiliki kekayaan benda-benda sejarah yang telah berusia ratusan tahun hingga saat ini masih terjaga dengan sangat baik.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang cukup dikenal dan diminati oleh masyarakat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi kepariwisataan yang dimiliki di daerah ini memiliki daya tarik yang cukup kuat karena didukung oleh keberagaman objek wisata yang tersedia. Berdasarkan data jumlah objek wisata pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang relatif banyak dan beragam dengan total sekitar 176 objek wisata yang mencakup objek wisata alam, wisata sejarah, serta wisata budaya.¹⁴ Beberapa destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar antara lain, Istana Basa Pagaruyung, Puncak Pato, Balairung Sari, Prasasti Adityawarman, Batu Basurek, Batu Batikam, Batu Angkek-Angkek, Nagari Tuo Pariangan, Benteng Fort Van Der Capellen, Lembah Anai, Panaroma Tabek Patah, dan lain sebagainya.

Melihat potensi kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sebuah inovasi dalam sektor pariwisata melalui program Satu Nagari Satu *Event*. Program ini digagas oleh Bupati Eka Putra bersama Wakil Bupati Richi Aprian (periode masa jabatan tahun 2021-2024) sebagai upaya mengoptimalkan potensi wisata dan budaya di setiap nagari. Pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Kabupaten

¹⁴ Angraini Suci, "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19" (Universitas Andalas, 2022).

Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Roadmap* Pelaksanaan Program Unggulan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Program Satu Nagari Satu *Event* (SNSE) dilaksanakan dengan mengusung konsep partisipatif atau gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat di setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar. Program ini menerapkan prinsip oleh kita, dari kita, dan untuk kita semua sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan. Melalui program tersebut, berbagai elemen nagari berpartisipasi dalam penyelenggaraan beragam kegiatan, seperti festival budaya, *alek anak nagari*, kuliner tradisional, permainan rakyat, pertunjukan seni dan budaya, bazar UMKM, hingga kegiatan lain yang disesuaikan dengan karakteristik serta kearifan lokal masing-masing nagari.¹⁵

Tercatat pada tahun 2022, pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* berhasil diselenggarakan di 14 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 26 nagari, sedangkan pada tahun 2024, program ini dilaksanakan di 22 nagari.¹⁶ Berbagai kegiatan yang dihadirkan dalam program ini, seperti festival budaya, *alek anak nagari*, kuliner tradisional, pertunjukan seni, bazar UMKM, serta kerajinan khas nagari, diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan merasakan secara langsung keunikan serta identitas budaya masing-masing nagari.¹⁷

¹⁵ Hidayat, *Op.Cit.* hlm 118.

¹⁶ Wawancara dengan Analis Pemasaran Kerja Sama Bidang Pariwisata di Dinas Parpora Kab. Tanah Datar, Riza Anggraini, pada tanggal 24 April 2025, pukul 14.23.

¹⁷ Aura Azzahra Alfian. (2024). "Melestarikan Budaya Lewat Satu Nagari Satu *Event*" diakses melalui <https://langgam.id/melestarikan-budaya-lewat-satu-nagari-satu-event> pada tanggal 24 Februari 2025.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tanah Datar (Parpora), selaku *stakeholder* terkait telah mengeluarkan *Calendar of Event* 2022 yang akan dilaksanakan dari Februari-Desember 2022. Sehingga setidaknya terdapat banyak *event* kebudayaan yang telah dirancang Dinas Parpora dalam rangka pemulihan pariwisata. Kegiatan Satu Nagari Satu *Event* ini diawali “Sapakan Alek Anak Nagari Andaleh” oleh Nagari Andaleh Baruh Bukik, Sungayang pada tanggal 4-10 Mei 2022 dan ditutup oleh kegiatan “Festival Tenun” oleh Nagari Tanjung Bonai, Lintau Buo Utara pada tanggal 5-6 November 2022. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, tercatat adanya kurang lebih 957.200 wisatawan yang berkunjung ke Tanah Datar. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut berasal dari rangkaian acara kebudayaan yang telah dirancang oleh Dinas Parpora, termasuk kegiatan Satu Nagari Satu *Event*.¹⁸



¹⁸ Data Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 dan 2023.

Gambar 1. 1 Kalender Satu Nagari Satu Event Tahun 2022



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Tanah Datar

Gambar 1. 2 Festival Tenun Nagari Tanjung Bonai Tahun 2022



Sumber: Jadesta Kemenparekraf

Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 26 nagari berpartisipasi mengikuti kegiatan Satu Nagari Satu *Event*. Kegiatan ini terdiri dari 18 nagari baru dan ditambah 8 nagari yang sudah melaksanakan *event* tahun lalu. Program SNSE sudah disusun melalui *Calendar of Event* yang diawali dengan kegiatan “Pesona Tobek Loweh” oleh Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum dari tanggal 11-13 Maret 2024. Lalu SNSE diakhiri dengan kegiatan “Festival Pesona Pangan” oleh Nagari Pangan, Kecamatan Lintau Buo dari tanggal 2-4 Desember 2023. Melalui rangkaian acara kebudayaan pariwisata dan termasuk kegiatan Satu Nagari Satu *Event* tahun 2023, Kabupaten Tanah Datar berhasil menarik kunjungan wisatawan dengan total sebanyak 1.135.317 orang.¹⁹

Gambar 1. 3 Calendar of Event 2023



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Tanah Datar

¹⁹ Ibid

Gambar 1. 4 Pesona Tobek Loweh Nagari Parambahan Tahun 2023



Sumber: *rakyaatterkini.com*

Kemudian di tahun 2024, terdapat 22 kegiatan yang direncanakan untuk Satu Nagari Satu *Event*, diantaranya yaitu kegiatan “Festival Tanjuang Barulak 1000 Dulang” oleh Nagari Tanjuang Barulak, “Festival Alu Katentong” oleh Nagari Padang Laweh, “Festival Balerong Sari Tabek” oleh Nagari Tabek, “Festival Pesona 1000 Talam Ompek” oleh Nagari Tanjuang Bonai dan SNSE diakhiri oleh kegiatan “Festival 1500 Lamang Kujuik” oleh Nagari Batipuh Ateh pada Oktober 2024.



Gambar 1.5 *Calendar of Event 2024*

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Tanah Datar

Gambar 1. 6 Festival Balerong Sari Tabek Nagari Tabek Tahun 2024



Sumber: *horizone.co.id*

Terselenggaranya kegiatan Satu Nagari Satu *Event* hingga tahun 2024 telah menghasilkan beberapa nagari yang terbaik, salah satu diantaranya yaitu Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo yang ditetapkan sebagai pelaksana terbaik program unggulan Satu Nagari Satu *Event* di Kabupaten Tanah Datar tahun 2022.²⁰ Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penilaian dewan juri yang menunjukkan bahwa Nagari Pangian memiliki keunggulan pada beberapa indikator, di antaranya tingginya tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah nagari, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kebersihan lokasi *event*, konsep penyelenggaraan, serta optimalisasi promosi kegiatan melalui media sosial.²¹

Keberhasilan tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana Nagari Pangian kembali mempertahankan predikat nagari terbaik dalam pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event*. Wali Nagari Pangian, Hijrah Adi Sukrial memaparkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tersebut didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat nagari dalam menyukseskan kegiatan, serta adanya dukungan dari berbagai unsur kelembagaan nagari, seperti, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pangian, *Bundo Kanduang*, PKK, dan kelompok pemuda. Disisi lain, terdapat

²⁰ Satukan Negeri. (2022). "Nagari Pangian Terbaik Penyelenggaraan Satu Nagari Satu *Event* Tanah Datar". *Satukan Negeri*. Diakses melalui <https://www.satukanegeri.co.id/post/243180/> pada tanggal 25 Februari 2025.

²¹ Dinas Komunikasi dan Informatika (2022). "Nagari Pangian Terbaik Penyelenggaraan Satu Nagari Satu *Event* Tanah Datar. *tanahdatar.go.id* Diakses melalui <<https://tanahdatar.go.id/berita/nagari-pangian-terbaik-penyelenggaraan-satu-nagari-satu-event-tanah-datar>> pada tanggal 25 Februari 2025.

terobosan baru yang dilakukan Panitia Festival Pesona Pangian, yaitu menjalin kolaborasi dengan sektor perbankan, yakni merangkul Bank Syariah Malibu.²²

Gambar 1. 7 Festival Pesona Pangian Terbaik Pelaksanaan SNSE 2023



Sumber: *Beritanagari.com*

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan menghadapi beberapa tantangan sehingga pelaksanaannya dipandang belum optimal. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Pariangan, Tasman, sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam konteks Satu Nagari Satu *Event* ini bagus, pemerintah menggali potensi yang ada di nagari. Tetapi dalam pelaksanaannya, terutama di Nagari Pariangan sepertinya belum dapat dikatakan berhasil, karena kontennya yang kurang menarik, acara yang diangkat tidak *booming*. Sehingga dalam tataran pelaksanaannya atau implementasinya kurang sejalan dan tidak sesuai yang diharapkan. Yang datang berkunjung tidak seberapa, bahkan yang membuat rame hanya masyarakat yang berjualan, ya

²² Berita Nagari. (2023). “Festival Pesona Pangian Pertahankan Status Terbaik Pelaksanaan Satu Nagari Satu *Event* 2023,” *beritanagari.com*. Diakses melalui <<https://beritanagari.com/festival-pesona-pangian-pertahankan-status-terbaik-pelaksanaan-satu-nagari-satu-event-2023>> pada tanggal 26 Februari 2025.

karena itu acara yang diangkat tidak menjadi magnet bagi wisatawan. Jadi acaranya itu hanya sekadar saja.”²³

Berdasarkan keterangan di atas, Satu Nagari Satu *Event* yang dilaksanakan di Nagari Pariangan di tahun 2022 belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh kesulitan nagari dalam mencari ide yang menarik untuk mengangkat acara sehingga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keuntungan atau pendapatan yang diterima pun hanya diperoleh bagi masyarakat yang berjualan atau pelaku UMKM setempat. Sehingga pelaksanaan SNSE di Nagari Pariangan ini belum memberikan keuntungan yang signifikan terhadap pendapatan asli nagari.

Lalu juga terdapat beberapa nagari lain yang belum dapat melaksanakan *event*. Terdapat empat nagari yang menyatakan mundur masing-masing yaitu Nagari Batu Taba, Nagari Pandai Sikek, Nagari Gunung Rajo, dan Nagari Tanjung Bonai. Mundurnya empat nagari ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti bersamaan dengan pelaksanaan MTQ di kecamatan, pelaksanaan berbarengan dengan Pilwanag (Pemilihan Wali Nagari), serta adanya keterbatasan biaya anggaran. Dalam hal ini, Kabid Pariwisata mengatakan bahwa pelaksanaan Satu Nagari Satu *Event* ini tidak ada nagari yang dipaksakan, keseluruhan acara diproses dan dianggarkan sesuai dengan proposal yang diajukan.²⁴

Pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event* tidak terlepas dari adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Nagari serta partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat nagari sebagai pelaksana kegiatan

²³ Wawancara dengan Wali Nagari Pariangan, Tasman, pada tanggal 25 April 2025, pukul 10.35.

²⁴ Sabanakaba. 2023. “Lima Nagari Mundur, Progul Tanah Datar Satu Nagari Satu *Event* Tetap Lampau Target” diakses melalui <https://sabanakaba.com/baru/lima-nagari-mundur-progul-tanah-datar-satu-nagari-satu-event-tetap-lampau-target> pada tanggal 25 Februari 2025.

tersebut. Dalam implementasinya, keterlibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan sanggar seni memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan *event* di masing-masing nagari. Selain itu, adanya peran dari Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar dalam merancang konsep pengembangan pariwisata berbasis program unggulan yang berorientasi pada pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten lebih berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan kebijakan serta stimulus bagi pelaksanaan program Satu Nagari Satu *Event*.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan bahkan di tingkat lokal, menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program Satu Nagari Satu *Event*. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam proses merencanakan, mengorganisir, dan memfasilitasi pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah daerah juga membentuk tim kurator yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Akademisi dari Perguruan Tinggi, Pemerhati Budaya, dan Pelaku Seni. Tim kurator tersebut melakukan perencanaan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program SNSE. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim kurator terlebih dahulu melakukan pembekalan kepada nagari penyelenggara guna memberikan arahan dan memastikan pelaksanaan *event* berjalan secara optimal.²⁵

²⁵ Suci Angraini, Indah Adi Putri, dan Roni Ekha Putera, "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11.1 (2024), hal. 1–13.

Di tingkat lokal, terdapat berbagai peran seperti Badan Musyawarah Nagari (Bamus), Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, serta Bundo Kanduang yang akan menjadi penggerak serta berperan penting dalam mengkoordinasikan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan SNSE ini, Bamus membantu dalam mengidentifikasi potensi lokal dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat didengar dalam setiap tahap pelaksanaan program. Kemudian, terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan generasi muda yang berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pariwisata, sebagai panitia penyelenggara, serta berperan dalam perencanaan kegiatan Satu Nagari Satu *Event*. Keterlibatan Pokdarwis ini juga berperan dalam melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.²⁶

Gambar 1. 8 Rapat dan Diskusi Perangkat Nagari dalam Proses Persiapan SNSE di Nagari Pariangan



Sumber: Dokumentasi pihak Wali Nagari Pariangan

Di samping itu, pihak swasta juga mengambil peran dalam mensukseskan Satu Nagari Satu *Event*. Adanya keterlibatan dunia usaha seperti

²⁶ *Ibid.*

perhotelan/*homestay*, restoran, pemilik objek wisata, dan pihak perbankan yang berkontribusi dalam mendukung program melalui sponsor, penyediaan fasilitas, dan layanan. Adapun pihak swasta ini terdiri dari Bank Nagari, PT Amanah Insanillahia, Himpunan Pramuwisata (HPI), Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).²⁷

Gambar 1. 9 Rapat Pertemuan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar bersama HPI, ASITA, dan Pelaku Usaha Pariwisata



Sumber: Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Kab. Tanah Datar

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan karakteristik pelaksanaan program *Satu Nagari Satu Event* di setiap nagari tidak hanya dipengaruhi oleh potensi wisata atau kondisi wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana *stakeholder* menjalankan perannya, membangun koordinasi, serta menjalin hubungan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemetaan *stakeholder* untuk mengetahui posisi, peran, tingkat pengaruh (*power*), serta tingkat kepentingan (*interest*) masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan *Satu Nagari Satu Event*. Untuk

²⁷ Wawancara dengan Kabid Pariwisata, Gusfayanti, di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, pada 24 April 2025, pukul 14.17.

menganalisis keterlibatan berbagai *stakeholder* tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *Power versus Interest Grid* yang dikemukakan oleh John M. Bryson (2004).

Oleh karena itu, dengan data-data, fenomena yang dikumpulkan, serta asumsi peneliti, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemetaan pemangku kepentingan dalam program Satu Nagari Satu *Event* di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pemetaan pemangku kepentingan dalam Program Satu Nagari Satu *Event* di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teori dan konsep *stakeholder mapping*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji fenomena terkait pemetaan pemangku kepentingan di dalam pemerintahan, serta memperkaya literatur terkait keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran kepada pembaca mengenai pemetaan pemangku kepentingan dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, sehingga dapat memperluas wawasan mengenai pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

